

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(BRIDA)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

JL. Garuda No.30A PALU

Telp/Fax :(0451) 8446226, 8888060

Website : www.bppid.sultengprov.go.id

Email : bridasulteng@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
(BRIDA)

JL. GARUDA NOMOR 30A Telp./Fax. (0451) 426810 - 457103 PALU 94111
Website : www.balitbangda.sultengprov.go.id Email : balitbangda@sulteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor :

T E N T A N G
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
 - b. bahwa RENJA Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mencakup Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650517 199203 2 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Kerja Perubahan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah”** Tahun 2023 ini dapat disusun.

Penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah; memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD; serta sebagai masukan dan evaluasi dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kiranya penyusunan dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran pegawai BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 196500517 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penyusunan	3
BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	4
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan/2023).....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	11
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	15
3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023	16
BAB IV. PENUTUP	23
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	23
4.2 Rencana Tindak Lanjut	24

DAFTAR TABEL

- TABEL 2.1 : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN II BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
- TABEL 2.2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN BERJALAN S/D TRIWULAN II
- TABEL 3.1 : RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PERUBAHANTAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk diubah dikarenakan perlunya dilakukan perubahan seiring dengan kondisi wilayah atau perubahan kebijakan pusat/daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang–Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141).
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud

1. Pedoman pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Pedoman penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

Tujuan

sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penyusunan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BRIDA Sampai Dengan Triwulan II (Tahun 2022).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Selanjutnya evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BRIDA Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan/2023).

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d JUni Tahun 2023)
1						2	3	4	5
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
5	05	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B
5	05	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	1 dok	-
5	05	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	<i>Jumlah dokumen RKA</i>	2 dok	1 dok
5	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</i>	2 lap	1 lap
5	05	01	1	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja</i>	1 lap	1 lap
5	05	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 %	50 %
5	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	6 bulan
5	05	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah lap penyediaan administrasi ASN	1 lap	-
5	05	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah lap. keuangan akhir tahun	1 lap	-
5	05	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah lap.pengelolaan barang milik daerah	1 Lap	-
5	05	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah lap penilaian barang perangkat daerah	1 lap	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)
1						2	3	4	5
5	05	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B
5	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapannya	1 paket	50%
5	05	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan
5	05	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Lap	1 Lap
5	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	50%
5	05	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	50%
5	05	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket	50%
5	05	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	50%
5	05	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	50%
5	05	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jml lap. Pengadaan Barang	1 Lap	1 Lap
5	05	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Saprass Gedung Kantor /Bangunan yang disediakan	1 paket	1 paket

Kode					Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)	Tir Re
1					2	3	4	5	
5	05	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa	1 Lap	50%	
5	05	01	1	08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lap Jasa Surat Menyurat	1 lap	50%	
5	05	01	1	08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah lap Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 lap	50%	
5	05	01	1	08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 lap	50%	
5	05	01	1	08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 lap	50%	
5	05	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	1 Lap	50%	
5	05	01	1	09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara kondisinya	42 unit	50%	
5	05	01	1	09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara pajak dan perizinannya	42 unit	50%	
5	05	01	1	09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket	50%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)
1						2	3	4	5
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 2. Persentase PD yg difasilitasi dlm penerapan Inovda.	100%	-
5	05	02	1	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan	2 dok	-
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi	1 lap	50%
5	05	02	1	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk yang di manfaatkan oleh PD Prov dan Kab/ Kota	1 dok	-
5	05	02	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	50%
5	05	02	1	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian	-	50%
5	05	02	1	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian	-	50%
5	05	02	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang yang di manfaatkan oleh PD Prov dan Kab/ Kota	2 dok	-
5	05	02	1	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	50%
5	05	02	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	50%
5	05	02	1	03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian	-	50%

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Mei Tahun 2023)
1						2	3	4	5
5	05	02	1	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah	3 dok	-
5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1 dok	50%
5	05	02	1	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Ujicoba	1 laporan	50%
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi	1 laporan	50%

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BRIDA, kesimpulan capaian kinerja OPD Tahun Anggaran berjalan berupa

1. Sub Kegiatan yang telah memenuhi target/telah selesai dilaksanakan yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (100%);
2. Adapun Sub Kegiatan lainnya masih pada tahap 50 % penyelesaiannya; dan
3. Untuk Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2023 ini yaitu **tidak ada (nihil)**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan s.d Triwulan II

No	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi / Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5
1.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	25 %	25%	Pencapaian target kinerja tersebut masih dalam proses dan OPD meyakini dapat memenuhi target tersebut.
2.	Meningkatnya nilai aspek daya saing daerah pada :	2,71		Pencapaian target kinerja tersebut masih dalam proses dan OPD meyakini dapat memenuhi target tersebut.
	faktor penguat/enabling environment	3,25	3,25	
	sumber daya manusia / human capital	2,96	2,96	
	faktor pasar/market	2,76	2,76	
	ekosistem inovasi	2,18	2,18	
3.	Persentase Kajian DOB yang di fasilitasi	10 %	10%	Pencapaian target kinerja tersebut masih dalam proses dan OPD meyakini dapat memenuhi target tersebut.

Dalam rangka pencapaian target kinerja nomor 1, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis kepada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait beserta operator masing-masing guna mempersiapkan proses penginputan giat-giat inovasi di lingkungan masing-masing.

Selain itu, pihak OPD juga menjajaki kerjasama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah guna mendata dan sekiranya dapat memfasilitasi inovasi dari masing-masing peserta Diklat Kepemimpinan/Struktural, sehingga akan banyak pilihan-pilihan inovasi yang tentunya akan sangat menarik jika di fasilitasi lebih jauh oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun untuk target kinerja nomor 2, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah intens menjalin kerjasama dengan BRIN sebagai lembaga pusat yang menginisiasi Indeks Daya Saing Daerah. Melalui

Sementara untuk pencapaian target nomor 3, BRIDA optimis dapat merealisasikan target tersebut.

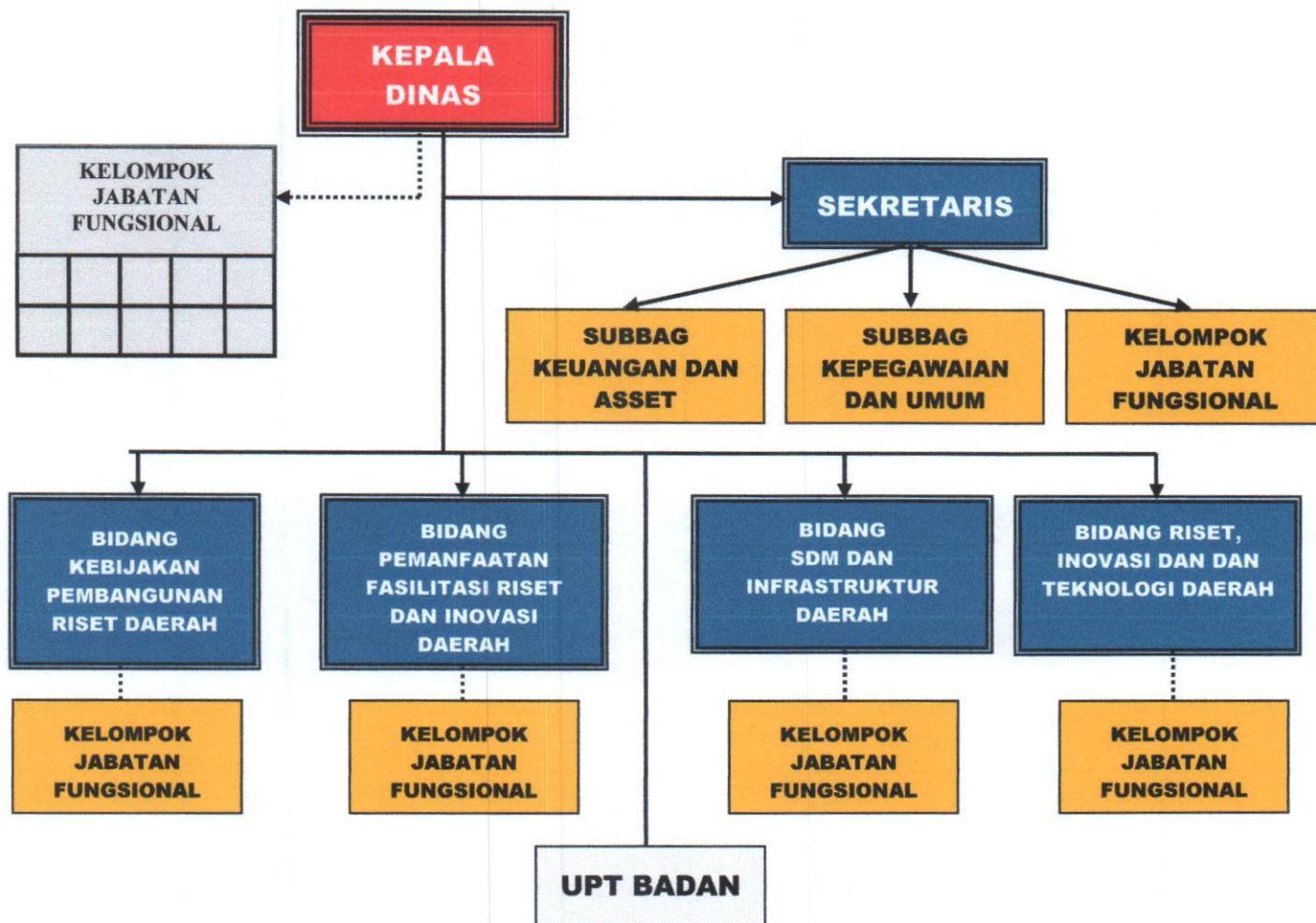
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BRIDA

Guna memberikan gambaran secara singkat terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diuraikan dalam Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta susunan organisasi sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah.
- 4) Bidang Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah.
- 5) Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah.
- 6) Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.**

b. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

c. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan pembangunan Riset Daerah Pemanfaatan, Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
4. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

d. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut dapat berupa hambatan (kendala), kelemahan dan kekuatan organisasi.

Adapun kondisi dan persoalan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya bidang kepakaran yang dimiliki oleh peneliti, sehingga tidak semua kegiatan litbang dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Masih belum tersedianya tenaga perekayasa;
3. Belum adanya sistem informasi (*linked database litbang*) kegiatan kelitbang yang telah dilakukan oleh PD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Litbang Kementerian yang ada di Sulawesi Tengah, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan kajian;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah belum berbasis riset.

5. Mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna. Hal ini berakibat minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis iptek;
6. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan;
7. Belum berkembangnya budaya Inovasi di kalangan Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai peraturan daerah;
2. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian.
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak hanya berujung pada kebijakan tetapi implementatif/terapan, agar hasil penelitian dapat langsung dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

Selain beberapa isu tersebut, pengembangan Inovasi Perangkat Daerah juga menjadi perhatian BRIDA saat ini. Kebijakan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan public yang berbasis inovasi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, perubahan rencana kerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Capaian									
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							
1					2		3		4		5		6		7		8	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks RB Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks RB Birokrasi Perangkat Daerah	64 Indeks	64 Indeks	11.960.732.380						
5	05	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 - 90	80 - 90	1.142.047.850						
5	05	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	1 dok	3 dok	120.900.000						
5	05	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA	2 dok	2 dok	948.047.000						
5	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 lap	2 lap	45.201.850						
5	05	01	1	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Jumlah laporan evaluasi kinerja	1 lap	1 lap	27.899.000						
5	05	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	100%	100%	8.730.339.114						
5	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan	Jumlah lap pembayaran gaji dan tunjangan	1 tahun	1 tahun	7.341.579.114						
5	05	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah lap penyediaan administrasi ASN	Jumlah lap penyediaan administrasi ASN	1 lap	1 lap	1.261.280.000						
5	05	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah lap.keuangan akhir tahun	Jumlah lap.keuangan akhir tahun	1 lap	1 lap	127.480.000						
5	05	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah lap.pengelolaan barang milik daerah	Jumlah lap.pengelolaan barang milik daerah	1 lap	1 lap	129.388.000						
5	05	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah lap penilaian barang perangkat daerah	Jumlah lap penilaian barang perangkat daerah	1 lap	1 lap	129.388.000						

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Capaian		Sebelum							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1						2		3		4		5		6		7		8	
5	05	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	%	208.770.531							
5	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapannya	1 paket	1 paket	202.270.531							
5	05	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	6.500.000							
5	05	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah dok ketatausahaan dan kepegawaian. 2. Jml lap. Penyediaan Bajas	1. Jumlah dok ketatausahaan dan kepegawaian. 2. Jml lap. Penyediaan Bajas	1 lap	1 lap	427.777.696							
5	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	12.106.253							
5	05	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	77.888.765							
5	05	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	32.218.724							
5	05	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	23.800.000							
5	05	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	281.763.954							
5	05	01	1	07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	1 lap	1 lap	194.064.793							
5	05	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Saprasi Gedung Kantor /Bangunan yang disediakan	Jumlah unit Saprasi Gedung Kantor /Bangunan yang disediakan	1 paket	1 paket	194.064.793							
5	05	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah lap ketatausahaan dan	Jumlah lap	1 lap	1 lap	338.030.000							

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Capaian									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							
1						2		3		4		5		6		7		8	
						Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah.		kepegawaian		ketatausahaan dan kepegawaian							
5	05	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah lap Jasa Surat Menyurat		Jumlah lap Jasa Surat Menyurat		1 lap		1 lap		10.700.000	
5	05	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah lap Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah lap Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		1 lap		1 lap		204.220.000	
5	05	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 lap		1 lap		26.160.000	
5	05	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 lap		1 lap		96.950.000	
5	05	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian		Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian		1 lap		1 lap		790.315.000	
5	05	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara kondisinya		Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara kondisinya		42 unit		42 unit		17.255.000	
5	05	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara pajak dan perizinannya		Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara pajak dan perizinannya		42 unit		42 unit		418.100.000	
5	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		Jumlah peralatan mesin yang dipelihara		1 paket		1 paket		354.960.000	
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ; Persentase PD yg difasilitasi dlm penerapan Inovda		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan; Persentase PD yg difasilitasi dlm penerapan Inovda		100 %		100 %		1.999.999.474	
5	05	02	1	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian		Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan		Jumlah Dokumen Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di tindaklanjuti dalam		1 Dokumen		2 Dokumen		699.999.750	

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Capaian									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum							
1						2		3		4		5		6		7		8	
										penyusunan kebijakan									
5	05	02	1	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bidang Otda	Jumlah laporan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bidang Otda	1 lap	2 lap	699.750.000							
5	05	02	1	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	Jumlah Hasil Litbang Bidang Sosduk yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	3 dok	1 dok	249.999.850							
5	05	01	1	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	243.759.850							
5	05	01	1	02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	-	3.120.000							
5	05	01	1	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	-	3.120.000							
5	05	01	1	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	Jumlah Hasil Litbang Bidang Ekbang yang di manfaatkan oleh PD Provinsi	3 dok	3 dok	499.999.774							
5	05	01	1	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	249.999.941							
5	05	01	1	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	149.999.883							
5	05	01	1	03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	99.999.950							
5	05	02	1	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah PD Prov, Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Prov Sulteng	Jumlah PD Prov, Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem Inovasi dan Teknologi Prov Sulteng	3 dok	3 dok	550.000.100							
5	05	02	1	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Penelitian	Jumlah Dokumen Penelitian	1 dok	1 dok	300.000.100							

Kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Capaian		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
1						2	3	4	5	6	7	8
5	05	02	1	04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Ujicoba	Jumlah Dokumen Ujicoba	1 dok	1 dok	115.864.800
5	05	02	1	04	03	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Diseminasi	Jumlah Laporan Diseminasi	1 dok	1 dok	134.135.200

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat beberapa perubahan pada pagu dan indikator yaitu :

1. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direncanakan penambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000.

Pada tahun 2023, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam bidang **Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Inovasi Dan Inovasi Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Provinsi Sulawesi Tengah**, dimana pada lampiran Rencana Kerja Kegiatan tercantum Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan dan Penyusunan Dokumen Roadmap Riset dan Inovasi di Sulawesi Tengah.

Mencermati akan hal tersebut, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan penyusunan kedua dokumen tersebut sekaligus menambahkan 2 dokumen pada target capaian, sehingga menjadi 3 dokumen.

2. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian, Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah, direncanakan penambahan anggaran sebesar Rp. 600.000.000.

Adapun peruntukkan dana tersebut untuk membiayai Fasilitasi Kajian Persiapan Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Donggala dan Tolitoli, sehingga jika hal tersebut terlaksana akan dapat mencapai target kinerja 2 dokumen untuk TA. 2023.

3. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, direncanakan penambahan anggaran sejumlah Rp. 400.000.000,- untuk membiayai Tindak Lanjut Pengembangan Kajian Pakan Ternak Berbasis Limbah Pertanian dan Tindak Lanjut Pengembangan Kajian Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Genjah.

Pada awal RKP 2023, kedua kajian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Sigi. Pemkab Sigi sangat mengapresiasi pelaksanaan kajian tersebut, sehingga mendorong kabupaten lainnya mengajukan ke BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan kajian tersebut di wilayah mereka.

direncanakan penambahan anggaran sejumlah Rp. 500.000.000,- yang akan dipergunakan untuk membiayai Tindak Lanjut Kajian SmartVillage di desa Pakuli Kabupaten Sigi dan Riset Konservasi Tumbuhan dan Kehutanan.

Kajian SmartVillage yang dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun awal RKPD 2023 merupakan tindak lanjut kajian yang sama pada TA. 2022 yaitu Inovasi Teknologi Kawin Silang Budidaya Sapi Donggala, sehingga sangat penting untuk dilanjutkan dalam rangka persiapan Sulawesi Tengah sebagai pemasok daging untuk kebutuhan Ibukota Negara Baru di Kalimantan Timur.

Adapun Riset Konservasi Tumbuhan dan Kehutanan merupakan tindak lanjut dari nota kerjasama BRIDA dan BRIN yang tercantum dalam Rencana Kerja Kegiatan Kerjasama tersebut.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

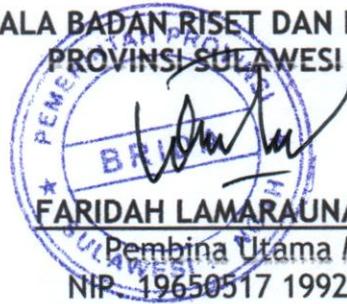
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi anatar RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006